



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI BANTEN-PERUM BULOG
PADA MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2020 –2021
TANGGAL 25-27 JANUARI 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2021**

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Pasal 67 dan 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Ke Perum Bulog di Banten didasarkan aturan pada undang-undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, dan Keputusan Rapat Intern Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE, MAP	PIMP F.P GOLKAR
2	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc	F. PDI PERJUANGAN
3	A-334	Drs. MUKHTARUDIN	F. P GOLKAR
4	A-65	ANDRE ROSIADE	F. P GERINDRA
5	A-115	KHILMI	F. P GERINDRA
6	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F. P GERINDRA
7	A-347	H. SUBARDI, SH, MH	F. P NASDEM
8	A-25	SITI MUKAROHMAH, S.Ag. MAP	F. PKB
9	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F. PD
10	A-447	AMIN, AK, MM	F. PKS
11	A-481	NASRIL BAHAR	F. PAN
12	A-498	PRIMUS YUSTISIO, SE	F. PAN
13	A-472	H. ACHMAD BAIDOWI, S.Sos, M.Si	F. PPP

C. Objek Kunjungan Kerja

Objek kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah Perum Bulog di Provinsi Banten.

D. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana strategi yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang tugas serta lingkup Komisi VI DPR RI, yaitu Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), BUMN, Investasi, dan Persaingan Usaha. Secara khusus, kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perum Bulog di Provinsi Banten dan mendapatkan masukan terkait ketersediaan pangan di era pandemi Covid 19.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Bulog di Provinsi Banten dalam agenda pertemuan ini adalah sebagai berikut:



Sambutan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI GDE Sumarjaya Linggih, SE, MAP

Program kerja Perum Bulog di Provinsi Banten dalam menjaga ketersediaan pangan di era pandemi Covid 19 dilaksanakan oleh tiga cabang, yaitu; cabang Tangerang, Serang dan Lebak. Kinerja Kantor Cabang Tangerang penyaluran beras Ketersediaan Pesokan Stabilisasi Harga (KPSH) 19.222.362 Kg. Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) 4.629.705 Kg. Penyaluran bantuan bantuan pangan beras provinsi banten 223.450 Kg. Stabilisasi Harga Komoditi Komersial (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu & Komoditi Lainnya). Total Omset RP10.400.441.305.

Kinerja Kantor Cabang Serang Tahun 2020. Penyaluran Beras Ketersediaan Pesokan Stabilisasi Harga (KPSH) 4.872.119 Kg. Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) 2.550.780 Kg. Penyaluran Bantuan Bantuan Pangan Beras Provinsi Banten 355.000 Kg. Stabilisasi Harga Komoditi Komersial (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu & Komoditi Lainnya). Total Omset RP12.950.224.480.



Paparan oleh Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita

Kinerja Kantor Cabang Lebak Tahun 2020. Penyaluran Beras Ketersediaan Pesokan Stabilisasi Harga (KPSH) 4,791,759 Kg. Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) 5,840,730 Kg. Penyaluran Bantuan Bantuan Pangan Beras Provinsi Banten 278.270 Kg. Stabilisasi Harga Komoditi Komersial (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu & Komoditi Lainnya). Total Omset Rp34,963,302,550.



Anggota Komisi VI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik di gudang Perum Bulog Cikande

Berdasarkan laporan kinerja ketiga cabang tersebut, Perum Bulog telah melaksanakan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin melalui program Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) sebanyak 13.021.235 kg di Provinsi Banten. Operasi pasar dalam meredam gejolak harga beras dengan penyaluran beras Ketersediaan

Pesokan Stabilisasi Harga (KPSH) juga telah dilakukan dengan menyalurkan total 28.886.240 Kg di Provinsi Banten. Sehingga pengelolaan Cadangan Beras selama pandemi Covid 19 di Provinsi Banten tetap dapat dilakukan dengan baik.

Penugasan pemerintah dan program bansos Covid 19 terhadap kinerja Perum Bulog sebanyak 450.000 ribu ton telah diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima manfaat (KPM) dengan menggunakan data program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar ke seluruh Indonesia. Penugasan ini membuat Stock Cadangan Beras Pemerintah CBP dapat keluar. Namun penugasan Bulog hanya berlangsung 3 bulan, dikarenakan ada perubahan Menteri Sosial yang baru menyebabkan adanya perubahan kebijakan menjadi bantuan tunai.



Komisi VI DPR RI menerima plakat dari Perum Bulog

Kendala-kendala yang dihadapi Perum Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan di era pandemi Covid 19 di Provinsi Banten diantaranya; Masih tersedianya beras stok ex import 2018 lebih dari 500.000 Ton. Kebijakan pemerintah mengenai hulu dan hilir dalam penyerapan dan penyaluran beras belum sinkron. Cadangan Beras Pemerintah hanya dapat dipergunakan untuk stabilisasi harga dan bencana alam. Diluar hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada permendag yang mengatur hal ini.

Bulog diberikan tugas untuk menyerap hasil panen rakyat pada saat panen raya, karena ketika panen raya harga gabah cenderung turun. Penyerapan yang dapat dilakukan hanya 1,2jt Ton, 85% dari target yang diberikan pemerintah, karena penyaluran beras melalui Perum Bulog masih sangat terbatas. Panen ada 170 rb ton tetapi hanya dapat menyerap 350 ton saja, karena fungsi tugas Bulog hanya sebagai Cadangan Beras Pemerintah saja. Kapasitas gudang bulog di Banten dapat menampung 90 rb ton, namun hanya terisi 29 ribu ton beras ex import beras Vietnam dan Thailand. Perum Bulog

mengharapkan Komisi VI dapat memberikan masukan kepada Kementerian terkait, sebentar lagi akan ada panen nasional dan Perum Bulog mengharapkan ada kemudahan dalam uang muka dan kejelasan penyaluran beras yang dibeli dari petani.

Komisi VI menyampaikan kepada Perum Bulog untuk tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai stabilisasi harga, namun juga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki seperti gudang dan produk komersial lainnya. Aset gudang yang dimiliki Perum Bulog dapat dimanfaatkan menjadi gudang pintar yang menggunakan kemajuan teknologi. Disisi lain, Perum Bulog juga sudah dua kali meminta PMN dan telah diberikan 16 Triliun untuk membayar hutang. Hutang yang disebabkan oleh kebijakan impor beras terdahulu tersebut perlu segera diselesaikan untuk Perum Bulog yang lebih baik.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Perum Bulog dalam memenuhi kebutuhan beras dalam masa pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.
2. Komisi VI DPR RI perlu menyampaikan berbagai catatan yang telah diperoleh selama kunjungan spesifik ke Perum Bulog didukung sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Banten pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 27 Januari 2021
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Banten

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE, MAP
A-327